

jogja
istimewa

jogja
istimewa



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RENJA

RENCANA KERJA

2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY
Jl. Argulobang No.19 Yogyakarta

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

2022

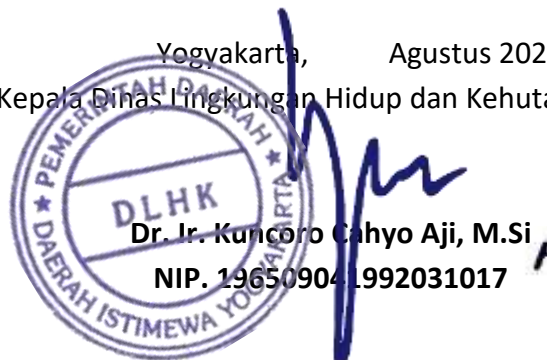
KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Rencana Kerja (Renja) DLHK DIY Tahun 2023 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Renja merupakan bagian dari tahapan penyusunan Renja. Renja DLHK DIY Tahun 2023 disusun berdasarkan standarisasi penamaan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renja DLHK DIY Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir program, kegiatan, subkegiatan pada periode RKPD DIY Tahun 2023 yang berkaitan dengan bidang urusan lingkungan hidup dan bidang urusan kehutanan.

Renja DLHK DIY ini disusun berdasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki DLHK DIY dalam mewujudkan kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu, pada tahun 2023 perencanaan pembangunan juga mempertimbangkan kondisi yang sedang terjadi saat ini yaitu masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang mengalami kelesuan dampak dari pandemi tersebut.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Renja DLHK DIY Tahun 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja DLHK DIY Tahun 2022 ini kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, Agustus 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY,



Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si
NIP. 196509041992031017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1. 1.1 Latar Belakang	1-1
2. 1.2 Landasan Hukum	1-2
3. 1.3 Maksud dan Tujuan	1-4
4. 1.4 Sistematika Penulisan.....	1-5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	2-1
5. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	2-1
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK DIY Tahun 2021	2-1
6. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-46
7. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2-52
8. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	2-56
9. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	2-92
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	3-1
10. 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3-1
11. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	3-4
12. 3.3 Program dan Kegiatan	3-5
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	4-1
13. 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	4-1
BAB 5 PENUTUP	5-1
14. 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja OPD	5-1
15. 5.2 Kaidah Pelaksanaan	5-1
16. 5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	5-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021	2-1
Tabel 2-2 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021.....	2-2
Tabel 2-3 Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2021	2-6
Tabel 2-4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-11
Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-47
Tabel 2-6 Komponen Penyumbang PDRB yang berasal dari Urusan Kehutanan.....	2-51
Tabel 2-7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-57
Tabel 2-8 Usulan Program dan Kegiatan yang Masuk melalui Forum OPD DLHK DIY.....	2-92
Tabel 3-1 Penyandingan tema kebijakan nasional tahun 2023 dengan tema kebijakan daerah tahun 2023.....	3-2
Tabel 3-2 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2023 - 2026.....	3-3
Tabel 3-3 Indikator Kinerja Utama Pemda DIY Tahun 2023 - 2026	3-4
Tabel 3-4 Sasaran Strategis DLHK DIY Tahun 2023	3-4
Tabel 3-5 Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.....	3-4
Tabel 3-6 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-1
Tabel 4-1 Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023.....	4-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2023 – 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023 – 2026. Sebagai turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah maka masing – masing perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan dokumen Renja adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah
5. Perumusan
6. Penetapan

Menindaklanjuti Surat Edaran Pemerintah Daerah DIY Nomor 050/1933 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka disusunlah Rancangan Renja dan Renja DLHK DIY Tahun 2023. Dokumen Renja DLHK DIY Tahun 2023 ini nantinya disempurnakan menjadi dokumen Renja yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DLHK DIY Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2026;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja DLHK DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah dalam RPD DIY Tahun 2023
2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategi RPD serta keselarasan program/kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan sesuai sasaran dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja PD setiap tahunnya

3. Sebagai pembandingan dalam mengukur kinerja instansi

Sedangkan tujuan disusunnya Renja DLHK DIY tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 yang sedang berjalan. Nantinya dokumen Renja DLHK DIY Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan DLHK DIY khususnya dan arah pembangunan DIY pada umumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DLHK DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini terdiri dari:

1.1. Latar Belakang;

Mengemukakan pengertian ringkas tentang kronologi proses penyusunan Renja DLHK DIY, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum;

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya termasuk yang mengatur tentang struktur organisasi DLHK DIY dan UPT di bawahnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLHK DIY

1.3. Maksud dan Tujuan;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja DLHK DIY

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Bab ini terdiri dari:

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Diawali dengan penelaahan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang kemudian dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Bab ini terdiri dari:

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

Penelaahan terhadap RPJP, RPJMN, RKP dan disandingkan dengan RPJMD, RKPD ditambah penelaahan Renstra instansi vertikal yang terkait dengan tugas dan fungsi DLHK DIY

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLHK DIY

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan/subkegiatan DLHK DIY Tahun 2022. Bab ini terdiri dari:

4.1. Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 dan prakiraan maju rencana tahun 2023

Merupakan visualisasi detil dalam bentuk tabel rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan DLHK DIY tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB 5 PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang terdiri dari:

5.1. Catatan penting dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

5.2. Kaidah Pelaksanaan;

Merupakan kaidah – kaidah yang disusun agar pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renja DLHK DIY Tahun 2022 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Hal – hal yang perlu menjadi perhatian terkait tindaklanjut dokumen Renja sebagai bahan acuan dalam proses penganggaran

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK DIY Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. **Rp89.522.403.388,-** selanjutnya melalui mekanisme perubahan menjadi Rp. **Rp82.682.830.180,-**. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 17.152.905.900	Rp. 18.334.140.250	Rp.1.181.234.350
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp.15.008.123.800	Rp.17.401.295.650	Rp.2.393.171.850
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.2.144.782.100	Rp.932.844.600	(Rp.1.211.937.500)
	Jumlah Pendapatan	Rp. 17.152.905.900	Rp. 18.334.140.250	Rp.1.181.234.350
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp.74.039.952.638	Rp.70.289.930.180	(Rp.3.750.022.458)
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp.40.106.113.641	Rp.37.814.744.391	(Rp.2.291.369.250)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp.30.540.984.247	Rp.29.472.307.539	Rp.1.068.676.708
5 1 05	Belanja Hibah	Rp.3.392.854.750	Rp.3.002.878.250	Rp.389.976.500
5 2	BELANJA MODAL	Rp.12.961.358.500	Rp.13.392.900.000	(Rp.431.541.500)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.11.682.283.500	Rp.11.444.635.000	(Rp.237.648.500)
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.187.700.000	Rp.187.700.000	0
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.955.375.000	Rp.615.405.000	(Rp.339.970.000)
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.136.000.000	Rp.145.160.000	(Rp.9.160.000)
	Jumlah Belanja	Rp89.522.403.388	Rp82.682.830.180	(Rp.6.839.573.208)
	Total Surplus/(Defisit)	Rp.72.369.497.488	Rp.64.348.689.930	(Rp8.020.807.558)

Dari total anggaran tersebut di atas, realisasi keuangan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 75.166.091.725,00 atau sebesar 90,91 %. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-2 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021

Kode	Program Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.793.999.283	40.839.067.535	95,43
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.593.000	131.858.000	97,25
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.098.000	138.100.590	99,28
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.644.884.391	36.171.253.060	96,09
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	862.118.000	819.934.984	95,11
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.090.000	2.041.600	97,68
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.970.000	25.486.900	94,50
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.254.000	30.187.000	99,78
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.920.000	97.763.600	99,84
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.673.000	19.931.500	96,41
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.070.000	88.090.000	95,68
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	6.540.000	87,20
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.252.000	169.885.284	99,20
2.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	559.735.000	483.111.900	86,31
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.320.000	7.315.000	99,93
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	669.001.692	458.559.212	68,54
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.440.000	195.077.000	99,81
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.239.000	13.013.998	75,49

Kode	Program Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	774.138.200	653.619.551	84,43
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.510.000	178.507.000	97,81
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.158.193.000	1.148.791.356	99,19
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	411.944.250	375.133.750	91,06
2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	411.944.250	375.133.750	91,06
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.228.935.000	1.072.962.150	33,23
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	151.866.000	139.371.000	91,77
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	2.413.400.000	307.890.000	12,76
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	663.669.000	625.701.150	94,28
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.737.031.500	1.504.721.300	86,63
2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	261.175.000	232.575.300	89,05
2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.475.856.500	1.272.146.000	86,20
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	196.818.000	175.213.500	89,02
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	104.288.000	99.308.500	95,23
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	65.750.000	65.225.000	99,20

Kode	Program Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	26.780.000	10.680.000	39,88
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	420.279.000	387.584.250	92,22
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	420.279.000	387.584.250	92,22
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.953.935.847	15.395.256.410	90,81
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	327.253.000	286.832.095	87,65
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	10.359.482.847	9.172.826.515	88,55
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.267.200.000	5.935.597.800	94,71
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.679.767.000	3.361.354.256	91,35
2.22.08.1.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	3.305.141.000	3.054.831.028	92,43
2.22.08.1.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	374.626.000	306.523.228	81,82
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.688.351.300	8.685.374.874	89,65
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	779.315.500	612.591.500	78,61
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	445.368.000	362.900.000	81,48
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	340.451.000	304.177.663	89,35
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	560.771.500	509.496.500	90,86
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	183.624.000	181.851.000	99,03
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	4.155.982.500	3.996.352.022	96,16

Kode	Program Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2.558.977.550	2.092.225.367	81,76
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	209.838.000	199.918.022	95,27
3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	14.410.000	14.358.200	99,64
3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	6.831.000	6.644.600	97,27
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	432.782.250	404.860.000	93,55
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	367.615.000	366.731.700	99,76
3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	223.017.000	222.145.700	99,61
3.28.04.1.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	144.598.000	144.586.000	99,99
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.204.154.000	3.002.692.000	93,71
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	15.710.000	14.623.000	93,08
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3.188.444.000	2.988.069.000	93,72
		82.682.830.180	75.166.091.725	90,91

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 bidang urusan, 10 program dengan 18 indikator kinerja program, 21 kegiatan, 50 subkegiatan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY juga turut mengampu urusan keistimewaan bidang urusan kebudayaan sebanyak 1 program, 2 kegiatan, 2 subkegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, program/kegiatan yang telah memenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2-3 Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	Batang	340000	357280	105,08
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kawasan hutan tertata	%	90,68	91,04	100,40
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	%	100	100	100,00
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kabupaten/kota	usaha/kegiatan	75	89	118,67
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai	usaha/kegiatan	237	246	103,80
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source)	Lokasi	120	125	104,17
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penurunan kerusakan hutan	%	0,1	2,15	2.150,00
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	Hektar	170	272	160,00
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional	ton/hari	720	794,09	110,29

No	Program	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
10	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kawasan hutan tertata	%	90,68	91,04	100,40
11	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	%	2	4	200,00
12	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	persentase hutan konservasi terkelola	%	76,97	76,97	100,00
13	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	Rasio	86,65	86,68	100,03
14	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan	3	10	333,33
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY	%	52,5	45	85,71
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100,00
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100,00
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100,00
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase Peningkatan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	%	16,8	16,8	100,00

Dari 18 indikator kinerja program, terdapat 17 indikator yang melampaui target, dan 1 indikator yang belum memenuhi target. Realisasi Indikator Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda

DIY pada tahun 2021 sebesar 45 %¹ sehingga belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 52,5 %. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan para pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program/kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2022, diperoleh faktor – faktor sebagai berikut:

1. Faktor – faktor pendukung pemenuhan target kinerja program/kegiatan:
 - a. Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD regular, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Keistimewaan;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
 - c. Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan;
 - d. Adanya dukungan teknologi yang memungkinkan penyelenggaraan program kegiatan dilakukan secara daring

2. Faktor – faktor penghambat pemenuhan target kinerja program/kegiatan:
 - a. Tingginya laju timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat yaitu pada tahun 2021 mencapai 1659,3633 ton/hari melebihi kapasitas daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan
 - b. Berdasarkan perhitungan kualitas air sungai diketahui bahwa sepuluh sungai yang ada di DIY kondisinya tercemar dengan 3 kategori: Tercemar Ringan-Sedang (Sungai Winongo, Sungai Tambakbayan, Sungai Kuning, Sungai Konteng); Tercemar Ringan-Berat (Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Bulus); dan Tercemar Sedang-Berat (Sungai Bedog, Oyo, Belik)
 - c. Tingginya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya permintaan akan lahan untuk kebutuhan tempat tinggal sehingga semakin banyak lahan terbuka (nonbuilt-up area), termasuk lahan pertanian, banyak yang dikonversi untuk dijadikan lahan permukiman
 - d. Masih belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis dan tingginya alih fungsi lahan;

¹ Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi sebanyak 36 usaha dan/atau kegiatan sedangkan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 88 usaha dan/atau kegiatan sehingga persentase tingkat ketaatan adalah sebesar 45%

- e. Kondisi tegakan hutan di DIY yang merupakan hasil gerakan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2001-2003 telah cukup memiliki nilai ekonomis sehingga berpotensi rawan pencurian kayu terlebih di masa Pandemi Covid 19;
 - f. Eksistensi hutan rakyat yang tergerus oleh maraknya alih fungsi menjadi lahan permukiman.
3. Dalam rangka mengantisipasi faktor – faktor penghambat tersebut hal yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut.
- a. Seperti yang diamanatkan di dalam Jakstrada DIY dan Jakstrada Kabupaten/Kota bahwa untuk mencapai target pengurangan sampah hingga sebesar 30% pada tahun 2025 maka perlu penerapan yang lebih intensif aktivitas pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumber/hulu. Beberapa langkah yang harus ditempuh antara lain adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah sejak dari tingkat kalurahan dengan memberdayakan Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis Reuse Reduce Recycle (TPS3R) dan Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat. Sementara dari segi penanganan di hilir maka perlu realisasi penerapan teknologi pengolahan sampah modern di TPA Regional.
 - b. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah DIY dalam mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah peningkatan kualitas air dengan cara mengidentifikasi sumber - sumber pencemar dan melakukan pembinaan terhadap pelaku/usaha kegiatan agar lebih tertib dan disiplin dalam mengelola limbahnya, melakukan kegiatan bersih sungai secara rutin, mengadakan penyedotan jamban secara berkala, pembangunan IPAL Komunal untuk limbah domestik, serta optimalisasi dan perbesaran sistem jaringan IPAL Komunal menuju IPAL Sewon. Sedangkan dari sisi peningkatan kuantitas air sungai dengan menghidupkan kembali mata air yang ada di sekitar sungai. Dengan bertambahnya debit aliran air sungai maka zat pencemar akan terencerkan sehingga meminimalisasi dampaknya terhadap organisme maupun lingkungan.
 - c. Untuk mengatasi persoalan akibat alih fungsi lahan antara lain dengan koordinasi lintas sektor dengan *leading sector* dari DPTR DIY untuk melakukan audit tata ruang dengan memantau secara ketat agar tidak terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang, melibatkan DPKP DIY dalam penentuan lahan persawahan yang dilindungi yang tercantum dalam RTRW dan RDTR sedangkan DLHK DIY mengeluarkan persetujuan lingkungan untuk pembangunan usaha dan/atau kegiatan yang mendasarkan pada kesesuaian ruang, serta serta mengurangi konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun dengan memberikan fasilitas sertifikasi lahan khusus sawah dan percontohan pertanian modern. Di samping itu sebagai upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau, pembuatan sumur resapan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah.

- d. Optimalisasi upaya penanganan degradasi lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi untuk penanganan lahan kritis dan lahan potensial kritis;
 - e. Intensifikasi patroli pengamanan hutan di seluruh unit pengelolaan di tingkat tapak dan meningkatkan Kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat di sekitar Kawasan hutan dalam pengamanan hutan;
 - f. Hingga tahun 2021, terdapat 26 orang penyuluh kehutanan yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani hutan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan rakyat
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Ketidaktercapaian program dan kegiatan mempengaruhi ketercapaian sasaran strategis khususnya sasaran nomor 1 yaitu Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas, dimana untuk tahun 2021 hanya tercapai sebesar 91,51 % dari target sebesar 97,02 %. Sedangkan untuk sasaran nomor 2 yaitu Meningkatnya nilai produksi kehutanan, karena realisasi tahun 2021 masih belum rilis dari BPS DIY sehingga masih menggunakan realisasi tahun lalu sebesar 955,42479 juta rupiah. Untuk target 2021 adalah sebesar 756,975 juta rupiah. Adapun evaluasi pelaksanaan renja DLHK DIY tahun lalu dan capaian renstra DLHK DIY secara terperinci disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2-4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	72,88 %		n/a			n/a		
		Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	77,15%		n/a			n/a		
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24		100	100		94		
0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100							

RENCANA KERJA TAHUN 2023

0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4								
0.00.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1								
0.00.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1								
0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1								
0.00.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1								
0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8								
0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertindaknya administrasi keuangan perangkat daerah	100								
0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1								
0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1								
0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2								

0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14							
0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100							
0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1							
0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100							
0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1							
0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1							
0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1							
0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1							
0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2							
0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1							
0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100							

0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4							
0.00.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1							
0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0							
0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6							
0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1							
0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100							
0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1							
0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1							
0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1							
0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100							

0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1							
0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	181							
0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11							
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	30 %					10 %		
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya penyusunan dokumen dalam rangka penetapan RPPLH (dokumen)	2							
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun (dokumen)	2							
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Penyusunan laporan validasi KLHS dan dokumen KLHS (dokumen)	1							

2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (dokumen)	1							
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	0							
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	100 %		100 %			100 %		
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim (dokumen)	7							
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (dokumen)	4							
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (dokumen)	1							
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (dokumen)	2							

2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (titik)	50							
2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50							
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	100 %		100 %			100 %		
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (dokumen)	1							
2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	1							
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	87,5 %		83,33 %			83,33 %		

2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan (%)	100							
		Terlaksananya pengawasan usaha/ kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (usaha/kegiatan)	30							
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (dokumen)	20							
2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	8							
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi (laporan)	30							
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	21,05 %		10,53 %			10,53 %		

2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	40							
2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	40							
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup	100 %		100 %			100 %		
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penambahan penghargaan LH tingkat nasional (penghargaan)	3							
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (entitas)	35							
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	100 %		100 %			100 %		
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup (%)	100							

2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani (dokumen)	1							
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)	92,86 %		85,71 %			85,71 %		
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional (%)	100							
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	3							
2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional (ton)	700							
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (unit)	1							
2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	700							
2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	6							
		Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	68,60%		68,60%			68,60%		

2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	30 dokumen		30 dokumen			30 dokumen		
2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	27							
2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	9							
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 entitas		7 entitas			7 entitas		
2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)	82							
2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	0							
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100							
2.22.08.5.08.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	2							

2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Hasil Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13						
2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1						
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	69.33 %		65,91 %			65,91 %	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH (dokumen)	2						
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2						
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya produksi hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan (Rp)	11019226825		n/a			n/a	
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1						
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	43						
3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	8						

3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jenis pemanfaatan	2							
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jenis pemanfaatan	2							
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)	275							
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5							
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (ha)	200							
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (ha)	30							
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	7							
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang dihasilkan	400000							
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya penataan kawasan hutan (%)	90,22							
		Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan (%)	100							
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15,581							
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (ha)	15581							

3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan (operasi)	12								
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1								
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1								
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (unit manajemen)	13								
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	13								
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun										
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya penambahan usaha perbenihan terdaftar (usaha)	16								
3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih	1								
3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1								
3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	1								

3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit									
3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	5							
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68,53			67,81			67,81	
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (%)	65							
3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah laporan kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA (laporan)	6							
3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	6							
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5							
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	3							
3.28.04.1.03.01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1							
3.28.04.1.03.02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	20							
3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	10							

3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	21							
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (orang)	180							
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10							
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	22.17 %		18,34 %			18,34 %		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat (kelompok)	15							
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	57							

3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	35							
1.11.1.11.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%						
1.11.1.11.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terkelolanya surat masuk		12 bulan						
		Terkelolanya pembayaran biaya kebersihan kantor		12 bulan						
		Terkelolanya pembayaran honor pengelola sampah		12 bulan						
		Terkelolanya pembayaran pajak kendaraan dinas :		178 unit						
		- Roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit)								
		- Roda 3 (3 Unit)								
		- Roda 4 (induk 18 unit, KPH 3 unit)								
		- Roda 6 (1 unit)								
		Terkelolanya pembayaran pajak kendaraan dinas :		12 bulan						
		- Roda 2 (induk : 90 unit, KPH : 74 unit)								
		- Roda 3 (3 Unit)								
		- Roda 4 (induk 18 unit, KPH 4 unit)								
		- Roda 6 (1 unit)								
		Terkelolanya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik :		12 bulan						
		- Induk 7 listrik, 6 telpon, 2 air								
		- Tahura 4 listrik, 1 air								
		- Laboratorium 1 listrik, 1 telpon								
-BBH 2 listrik, 2 telpon										
-KPH 33 listrik, 4 telpon, 19 air										
Terkelolanya pengadaan alat tulis kantor			106 jenis & 57 jenis							
Terkelolanya pengadaan barang cetakan			31 jenis & 9 jenis							
Terkelolanya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			32 jenis & 10 jenis							
Terkelolanya penggandaan/foto copy			100.000 lembar & 20.000 lembar							

		Terlaksananya pengiriman surat keluar		12 bulan						
		Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas)		12 bulan						
		Tersedianya peralatan rumah tangga		46 jenis & 20 jenis						
		Materai (6000 & 3000)		2340 lembar & 190 lembar						
		Kebutuhan untuk penanganan Covid 19								
		Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip								
		Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih								
		Retribusi/pajak								
		Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL Kantor								
		1. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor 2 kali, 2. Materai sebanyak 2340 lembar (materai 6000 & 3000) 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah 4. Terkelolanya surat masuk 1000 surat 5. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan, 6. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan, 7. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit 8. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan, 9. Terlaksananya penataan arsip 12 m2, 10. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis 11. Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis, 12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis, 13. Terlaksananya penggandaan/fotocopy 100.000 lembar 14. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat 15. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box 16. Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama 12 bulan 17. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis								
1.11.1.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa keamanan kantor		12 bulan						
		Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorar/Tidak tetap		97 orang selama 12 bulan						
		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan		12 bulan						
		Terlaksananya/honor pengelolaan kepegawaian								
		Terlaksananya pengelolaan kearsipan								
		Terlaksananya/Honor Pengelolaan Barang								

		Terlaksananya Biaya Fumigasi								
		Terlaksananya/Honor pengelolaan perencanaan program								
		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor								
		Tersedianya jasa pengelola arsip/perpustakaan								
		Honor pengelola keuangan								
		1. Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan, 2. Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan, 3. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan, 4. Tersedianya tenaga jasa kearsipan 6 orang, 5. Tersedianya tenaga jasa driver/sopir 8 orang, 6. Tersedianya jasa pegawai kontrak/non PNS/honorer/tidak tetap 12 bulan, 7. Terlaksananya pengelolaan barang 12 bulan, 8. Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3								
1.11.1.11.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah		1 tahun (Gol IV 148 kali, gol III 708 kali, gol II 284 kali)						
		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah		1 tahun (Gol IV 55 kali, gol III 110 kali)						
		Tersedianya makan dan minum rapat		1 tahun (4462 os)						
		1. Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan, 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan								
1.11.1.11.01.00.02	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR			100%						
1.11.1.11.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembuatan Portal TAHURA Bunder		4 unit						
		Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder		1 unit						
		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 92 m ² di Depo Arsip DLHK		92 m2						
		Terlaksananya penataan halaman kantor		204 m2						
		Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo - Bantul di Pengasih		1 unit						
		Penggantian papan nama gedung		6 unit						
		Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan								
		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor								
		Terlaksananya rehabilitasi bangunan pendukung								
		Rehabilitasi Kantor BDH KP Bantul								

		Rehabilitasi Gudang Briket/Daun Pabrik MKP Sendangmole									
		Dokumen lingkungan DLHK									
		Terlaksananya rehabilitasi tempat parkir induk dan BP3KP 1									
		DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan									
		Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan									
		1. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit, 2. Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring 1 paket, 3. Terlaksananya rehabilitasi tempat parkir induk dan BP3KP 1 paket									
1.11.1.11.01.00. 02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan dan perlengkapan gedung kantor									
		Almari Arsip Besi		3 buah							
		AC 2 PK untuk Bidang		8 unit							
		Televisi LED Untuk penggantian ruang rapat B		1 unit							
		Rak arsip									
		Pengadaan Komputer PC		17 unit							
		Pengadaan Komputer PC pemetaan									
		Pengadaan Laptop/Notebook		3 unit							
		Printer Laser Jet Umum		2 buah							
		Printer Epson/Cannon		11 buah							
		Printer Dot matrik LQ2190		2 buah							
		Printer Dot matrik LQ310									
		Printer IP 110 Print Portable		2 buah							
		Printer plotter		1 buah							
		Printer PSC		1 buah							
		Meja kerja		4 unit							
		Kursi kerja		4 unit							
		LCD/ viewer		4 unit							
Kamera		1 buah									
		Pengadaan washtafel									

		Tangga alumunium									
		Drone mapping									
		Peralatan dan Perlengkapan Wisma Erlangga									
		1. Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 jenis									
1.11.1.11.01.00. 02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Air Bersih		1 tahun							
		Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP		2 unit							
		Biaya pengecatan gedung aula B dan ruang arsip		725 unit							
		Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan		1 unit							
		Biaya perbaikan pintu ruangan arsip		2 unit							
		Pemeliharaan atap dinas induk		1 unit							
		Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder		1 paket							
		Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder		1 unit							
		Canopy tempat parkir		30 m2							
		Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul		8 unit							
		Pemeliharaan kantor argulobang		70 m2							
		Pembuatan ruang kearsipan		1 paket							
		Tempat parkir roda 3		8 m2							
		Pemeliharaan pos jaga dodokan		18 m2							
		Pemeliharaan mushola		80 m2							
		Pemeliharaan plafon		15 m2							
		Penggantian conblok		100 m2							
		Pemeliharaan Saluran air hujan		50 m							
		Pemasangan pagar BRC		60 m							
		Biaya pengecatan gedung		750 m2							
Biaya perbaikan pintu kamar mandi		2 buah									
Biaya perbaikan pintu ruangan		2 unit									
Biaya pemeliharaan eternit		20 m2									

		Biaya pemeliharaan dinding kaca	20 m2							
		Penggantian kusen dan daun pintu jendela bidang P3KLH								
		Pemeliharaan Kamar Mandi Gedung Balai Perbenihan Kehutanan								
		Pemeliharaan BDH Panggang dan RPH Kepek								
		Pemeliharaan KM/WC bidang P3KLH								
		Pemeliharaan KM/WC bidang PPH								
		Tambah daya listrik Balai KPH								
		Pemeliharaan rutin gedung DLHK								
		Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	1 kali							
		Biaya perbaikan pintu kamar mandi								
		Pemeliharaan Kantor Tahura								
		1. Terpeliharanya gedung kantor 10 unit								
		Pemeliharaan ruang bidang P3KLH								
1.11.1.11.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Perawatan kendaraan dinas operasional 230 unit								
		Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas -Roda 2 (induk :90 unit, KPH: 74 unit) Roda 3 (3 unit) Roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 4 unit), Roda 6 (1 unit)								
		Kendaraan roda 2 (induk:79 unit, KPH:74 unit)	153 unit							
		Kendaraan roda 3	3 unit							
		Kendaraan roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit)	21 unit							
		Kendaraan roda 6	1 unit							
1.11.1.11.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jaringan Listrik	1 unit							
		Instalasi telepon & PABX								
		Jaringan internet	3 unit							
		Pemeliharaan Genset	4 unit							
		Pemeliharaan pompa air	5 unit							
		Pemeliharaan pesawat telepon/airphone	15 unit							
		Pemeliharaan pemotong rumput	5 unit							
		Pemeliharaan gergaji mesin	3 unit							

		Pemeliharaan komputer /PC	65 unit						
		Pemeliharaan/Perawatan Note Book	40 unit						
		Perawatan TV & Monitor	5 unit						
		Perawatan mesin ketik	9 buah						
		Perawatan Camera	2 buah						
		Pemeliharaan LCD	5 buah						
		Perawatan Faximile	2 buah						
		Pemeliharaan elektronik Eks. Hut.	3 unit						
		Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP	1 unit						
		Pemeliharaan Printer	3 unit						
		Perawatan TV LCD	2 unit						
		Pemeliharaan AC							
		Perbaikan AC Dinas Eks. Hut	2 unit						
		Pemeliharaan CCTV	1 unit						
		Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH	5 unit						
		Meja-Kursi Tamu	1 unit						
		Filling Kabinet	2 unit						
		Almari Sliding Kaca	1 unit						
		Meja Kerja	5 unit						
		Kursi Kerja	10 unit						
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	31 buah & 6 buah						
		Pemeliharaan Diesel Air Balai Perbenihan Kehutanan							
		Instalasi telepon	2 unit						
		Perawatan AC	81 unit						
		1. Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis							
1.11.1.11.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								

1.11.1.11.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu :- Penilaian Angka Kredit 2 kali, - Penerbitan Jurnal 1 kali		n/a							
1.11.1.11.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%							
1.11.1.11.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah		1 dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan DLHK DIY Tahun 2021							
		Tersusunnya dokumen statistik									
		Dokumen statistik, materi laporan LKjIP dan LKPJ		1 dokumen statistik dan 1 materi laporan LKjIP dan LKPJ							
		Tersusunnya Renja OPD									
		Tersusunnya Renja OPD n+1 dan Renja Perubahan n		1 dokumen Renja OPD 2021 dan 1 dokumen Renja Perubahan OPD 2020							
		Tersusunnya RKA Th n+1 dan DPA Th n+1 (2 dokumen)		2 dokumen RKA Tahun 2021 dan DPA Th 2021							
		Tersusunnya RKA-P Th n dan DPPA Th n (2 dokumen)		2 dokumen RPA-P Tahun 2020 dan DPPA Th 2020							
		Tersusunnya ROPK tahun n		1 dokumen ROPK 2020							
		Tersusunnya data IKLH		1 dokumen IKLH							
		1. Forum Perangkat Daerah 1 kali 2. Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen, 3. Publikasi LH di media publik 3 media, 4. Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen, 5. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen), 6. Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019 (2 dokumen) 7. Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen)									
1.11.1.11.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan		12 dokumen laporan monev							
		1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (12 dokumen)									

1.11.1.11.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK		2 laporan LKPJ dan LPPD					
		Tersusunnya LKJIP		1 laporan LKJIP 2019					
		Tersusunnya Laporan Tahunan							
		1. Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan), 2. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)							
1.11.1.11.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan		12 laporan keuangan bulanan					
		Laporan Keuangan Semester		2 laporan keuangan semester					
		Laporan Keuangan Tahunan Audited		1 laporan keuangan audited					
		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan		1 laporan keuangan tahunan gabungan					
		1. Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan), 2. Laporan Keuangan Semester (2 laporan), 3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan), 4. Laporan Keuangan Triwulan (4 laporan)							
1.11.1.11.01.00.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota		100,00%					
		Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY		48,75%	52,50%	45%			
1.11.1.11.01.00.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	Penilaian /pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan		12 bulan					
		Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY		12 bulan					
		Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan		5 kab/kota					
		Dokumen Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) DIY		1 dokumen					
		Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY							
		Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY		1 dokumen					
		1. Terlaksananya Validasi KLHS 5 kab/kota 2. Terlaksananya Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 12 bulan, 3. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/pemeriksa dokumen lingkungan, 4. Terlaksananya Penyusunan IKPLHD 1 dokumen, 5. Terlaksananya Penetapan dan Perhitungan IKLH Tahunan 1 dokumen							

1.11.1.11.01.00. 16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk	12 bulan						
		Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Ijin Usaha/Kegiatan							
		Penyediaan Perlengkapan Pengawasan dan Penegakan Hukum							
		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan	160 usaha/kegiatan						
		Penilaian kinerja perusahaan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan	20 usaha/kegiatan						
		1.Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan 40 perusahaan, 2.Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan 15 Kegiatan/usaha,3.Terlaksananya tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk 12 bulan							
1.11.1.11.01.00. 17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai;	222 usaha/kegiatan	237	246				
		2. Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source);	96 lokasi	120	125				
		3. Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kabupaten/kota	70 usaha/kegiatan	75	89				
1.11.1.11.01.00. 17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	1. Terlaksananya Gerakan Bersih Sungai 65 lokasi, 2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah) 100%, 3. Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) 100%,4. Terlaksananya Inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen							
1.11.1.11.01.00. 17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Gerakan bersih sungai	96 lokasi						
		Pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai							
		Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)	207 usaha/kegiatan						
1.11.1.11.01.00. 17.003	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY	5 kab/kota						
		Gerakan bersih pantai	2 lokasi						
		Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri							
		Pemantauan dan evaluasi kualitas air dan udara (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien)	5 dokumen						
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen						
		Pembinaan dan pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan LH Kab/Kota di DIY	5 kab/kota						

		Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah	25 kelompok						
		Evaluasi pengelolaan sampah mandiri di DIY	1 laporan						
		Kajian Evaluasi Pengurangan Sampah dari Pengelolaan Sampah mandiri di DIY							
		Kajian Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga di DIY							
		Koordinasi/pembinaan pengelolaan limbah B3 5 kab/kota, 2. Pengelolaan Sampah 5 kab/kota							
1.11.1.11.01.00.17.003	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	1. Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi							
1.11.1.11.01.00.17.004	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	1. Kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan							
		2. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan							
		3. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan 53 parameter							
		4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan							
		5. Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan							
1.11.1.11.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	3 penghargaan	3	10				
1.11.1.11.01.00.18.002	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (DLHK dan BPIPBJK) 1 unit	n/a						
1.11.1.11.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	1 dokumen						
1.11.1.11.01.00.18.003	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan	19 parameter						
		Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan	61 unit						
1.11.1.11.01.00.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	5 kab/kota 12 kali @40 orang						
		Penilaian /verifikasi penghargaan lingkungan hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura)							
		Kampanye penyadaran lingkungan hidup dan kehutanan	1 kali: 2 hari						
		Penilaian /verifikasi penghargaan lingkungan hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklamasi)	5 kab/kota						

		1. Terlaksananya pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan LH 4 penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru), 2. Terselenggaranya kampanye penyadaran LH 3 peringatan, 3. Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah, 4. Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan 5 kab/kota									
1.03.1.11.01.00.15	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL	Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional		n/a							
1.03.1.11.01.00.15.001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 ha) 2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit) 3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA (1,2 km) 4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit) 5. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit) 6. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 unit) 7. Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA (35 orang) 8. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan sekitar TPA (2 kali) 9. Pengadaan Perlengkapan K3 (6 jenis)		n/a							
1.11.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional		660 ton/hari	720	794,09					
1.11.1.11.01.00.20.01	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA		1,2 km							
		Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang		1 unit							
		Merti TPA Piyungan									
		Monev kinerja pengelolaan sampah dan penerimaan retribusi (2 unit)		2 dokumen							
1.11.1.11.01.00.20.02	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill		10 ha							
		Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA		1 unit							
		Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik		5 unit							
		Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA		35 orang							
		Pengadaan Perlengkapan K3		6 jenis							
		Operasi dan Pemeliharaan peralatan TPST		1 unit							
		Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA		2 lokasi							
		Hasil Uji Kualitas Air dan Udara									
		Kompensasi dampak negatif ke Desa terdampak TPA Piyungan									
Sewa Alat Berat (excavator & bulldozer)											

		Kompensasi lingkungan sekitar TPA (BKK)		2 lokasi							
		Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan pengolahan limbah B3 medis		2 dokumen							
		Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA									
		Pengadaan Alat Berat : a. Buldozer, b. Excavator, c. Kendaraan Tanki BBM									
1.11.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)		165 ha	120	272					
		Persentase penurunan kerusakan hutan		0,10%	0,10%	2,15%					
1.11.1.11.01.00.19.002	Peningkatan Tutupan Vegetasi	1. DED Pengembangan Wanadesa Caturharjo 1 dokumen, 2. DED Pengembangan Wanadesa Singosaren, Tamanan, Wirokerten 1 dokumen, 3. Monitoring Wanadesa 4 kab, 4. Pemeliharaan Wanadesa 10 lokasi, 5. Penanaman RTH JJLS - Rest Area 1 paket, 6. Pengembangan Wanadesa Wisata Brosot Galur Kulon Progo 1 lokasi									
1.11.1.11.01.00.19.003	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/ DAS	1. Monitoring Telagadesa 2 Kab, 2. Pembangunan Telagadesa 1 lokasi, 3. Pemeliharaan Telagadesa 2 lokasi, 4. Pengelolaan DAS Prioritas 12 bulan									
1.11.1.11.01.00.19.004	Konservasi Sumberdaya Hutan	1. Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar 1 dokumen, 2. Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai 6 ha, 3. Pembinaan Masyarakat Sekitar KSA/KPA 30 orang									
1.11.1.11.01.00.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY		1 dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY							
		Data Tutupan Lahan DIY		1 dokumen							
		Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY		1 dokumen							
		Dokumen Rencana Pengelolaan (RP) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY		1 dokumen RPRHL DIY 2021 - 2026							
		Penanaman Vegetasi		50 ha							
		Penanaman vegetasi (Terdiri dari: Hutan Rakyat Seluas 100 ha; Penanaman Bambu Seluas 15 Ha, Pengembangan Tanaman Ekowisata seluas 30 ha dan Penanaman Kawasan Pantai seluas 30 ha)									
		Penanaman Bambu									
1.11.1.11.01.00.19.005	Pengamanan Hutan	1. Fasilitas administrasi penyuluhan kehutanan 12 bulan, 2. Keamanan Hutan Terjamin 12 bulan, 3. Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 50 orang									

1.11.1.11.01.00. 19.005	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan		2 angkatan @25 orang							
		Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan									
		- Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun)									
		- Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH)									
		- Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian									
		- Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan									
		- Patroli Gabungan Pengamanan Hutan									
		Pembinaan Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan		6 angkatan @30 orang							
1.11.1.11.01.00. 19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (Mangrove) di Srigading, Sanden, Bantul (8.000 batang)									
		Konservasi Ekosistem Penyu									
		Konservasi lahan pantai									
		Data keanekaragaman hayati di hutan lindung RPH Mangunan		1 dokumen							
		Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 ha)		20 ha							
		Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder		60 orang (2 angkatan)							
		Rehabilitasi dan restorasi lahan pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah		10 ha							
		Rehabilitasi dan restorasi lahan pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 ha (1600 btg + 400 penyulaman) di Pantai Mlarangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo		5 ha							
		Konservasi Lahan Pantai Melalui Penanaman di Pasir Kadilangu, Temon, Kulon Progo (2000 btg)									
2	Urusan Pilihan										
2.04	Bidang Urusan Kehutanan										
2.04.1.11.01.00. 18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	Persentase kawasan hutan tertata		89,40%	90,68	91,04					
		Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat		2%	2	4					
2.04.1.11.01.00. 18.001	Penataan Hutan	Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak - pihak terkait									

		Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan								
		Pengelasan tanda batas pada daerah rawan	10 titik							
		Pengadaan GPS Mapping + antena eksternal	2 paket							
		Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan								
		Dokumen kajian potensi hutan rakyat								
		Pemeliharaan batas kawasan hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Daerah Hutan Panggang	23 km							
		Penyelesaian permasalahan tenurial kawasan hutan di Pansela	2 lokasi							
		Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan di Klanyar dan Ngingrong	2 dokumen							
		Inventarisasi tanda batas kawasan hutan BDH Kulon Progo-Bantul								
		1. Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan 2 lokasi, 2. Kajian Potensi Hutan Rakyat 1 dokumen, 3. Pemeliharaan dan Pengelasan Tanda Batas Kawasan Hutan 20 km, 4. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 20 km								
2.04.1.11.01.00.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Pengendalian penatausahaan hasil hutan	21 unit usaha							
		Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: Bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan (30 orang x 4 angkatan), Bimtek sertifikasi legalitas kayu (30 orang x 2 hari x 1 angkatan)	180 orang							
		1. Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan 4 BDH, 2. Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 4 BDH, 3. Pembinaan penatausahaan hasil hutan 20 perusahaan, 4. Pengendalian peredaran hasil hutan 4 BDH, 5. Penyusunan potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di luar kawasan 2 kabupaten								
2.04.1.11.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%							
2.04.1.11.01.00.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR							
		Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	20 kelompok HR							
		Fasilitasi Penyuluh Kehutanan	60 orang							
		Lomba Wana Lestari	7 kategori							
		Pelatihan hutan cadangan pangan	4 kab							

		Peningkatan Kelas KTH											
		Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat 4 kabupaten											
2.04.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan			86,4								
2.04.1.11.01.00.19.001	Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	1. Penyusunan Dokumen Kendali Petak 1 dokumen, 2. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) 1 dokumen, 3. Penyusunan Rencana Teknis Tahunan 4 dokumen											
2.04.1.11.01.00.19.002	Perlindungan Hutan	Perlindungan hutan terjamin 12 bulan											
	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman)			1 dokumen								
		Operasional Pencegahan Gangguan Keamanan Hutan dan Laporan Kerusakan											
		Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan laporan kerusakan hutan				2 dokumen							
		Penanaman Kayu Putih (80 Ha P0 : 10 Ha Tanaman Baru dan 70 Ha Peremajaan Tanaman, 100 Ha P1, 200 Ha P2)											
		Tanaman kayu putih baru (100 ha tanaman baru, 200 ha P1, 65 ha P2)				411.600 batang							
		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung (5 Ha Tanaman Baru, 10 Ha P1, 20 Ha P2)											
		Rehabilitasi kawasan hutan lindung (10 ha tanaman baru, 20 ha P1, 20 ha P2)				11.200 batang							
		Kajian Bisnis Pengelolaan Kayu Putih											
		Pembinaan KTH yang Melakukan Kemitraan Dalam Kawasan Hutan											
		Sertifikasi operator drone											
		Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas dalam kawasan				1 BDH (Kulon Progo-Bantul)							
	Pembinaan KTH dalam kawasan hutan				24 RPH								
2.04.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan			86,4								
2.04.1.11.01.00.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)			Minyak kayu putih 44.285 liter dan kayu 98 m ³								

		Pemeliharaan Jalan Produksi	2.000 m						
		Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	2 unit						
2.04.1.11.01.00.19.003	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	1. Produksi Hasil Hutan 2 komoditas, 2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung 20 ha, 3. Tanaman Kayu Putih Baru 559.200 batang							
2.04.1.11.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	330.000 btg	340000	357280				
2.04.1.11.01.00.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 367.280 batang)							
		Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang)	442.600 batang						
		Tersedianya bibit tanaman kehutanan bersertifikat 600.000 batang							
2.04.1.11.01.00.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	Bimbingan Teknis Pengadaan dan/Pengedar Benih/Bibit	20 org						
		Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan	4 sumber benih						
		Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 kabupaten						
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih	75 org						
		Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan	15 org						
		Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar	443.000 batang bibit; 2 sumber benih						
		Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan							
2.04.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	Persentase hutan konservasi terkelola	76,62%	76,97%	76,97%				
2.04.1.11.01.00.20.001	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	1. Pemeliharaan I tanaman bambu 600 batang, 2. Pemeliharaan satwa rusa 6 ekor, 3. Penataan batas dalam: 2km	n/a						
2.04.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	Pemantauan dan pemeliharaan batas kawasan	13 km						
		Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman (batang)	610 batang						
		Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi	12 bulan						
		Pemeliharaan arboretum	5 ha						
		Laporan RKL RPL Tahura	2 dokumen						

		Pemantauan dan Pemeliharaan Batas Luar								
2.04.1.11.01.00. 20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder:								
		a. Sosialisasi sekolah								
		b. Banner								
		Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder: a. Sosialisasi siswa sekolah, b. Leaflet dan Banner		1.a.4 kali @100 orang b.1000 lembar dan 15 unit						
		Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura		6 kelompok						
		Pengamanan Kawasan								
		Pengamanan Kawasan: a. Papan informasi pengamanan hutan, b. Pembuatan sekat bakar, c. Pelatihan keamanan wisata, d. Pelatihan pengamanan hutan, e. Pelatihan pencegahan kebakaran hutan		12 bulan: a. 2 unit, b. 20.000 m2, c. 30 org, d. 20 org, e.20 org						
		Pengamanan Kawasan: a. Pembuatan sekat bakar, b. Pelatihan keamanan wisata, c. Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan, d. Seragam dan Kelengkapan MMP								
		Pembersihan Lahan Bawah Tegakan								
		Papan nama pohon		60 unit						
		Laporan RKL RPL Tahura								
		1.Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder 4 angkatan @30 orang, 2. Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) 3 jenis, 3. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder 12 bulan								
3	Urusan Keistimewaan									
3.05	Bidang Urusan Pertanahan dan Tata Ruang									
3.05.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		32,22%						
3.05.16.015	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Gerakan Bersih Pantai Selatan Kulon Progo		2 lokasi						
3.05.16.021	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	Gerakan Bersih Pantai Selatan Gunung Kidul		2 lokasi						
3.03	Bidang Urusan Kebudayaan									

3.03.25	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	<i>Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing</i>		0,1						
3.03.25.021	Kegiatan Pengembangan Wanawisata Budaya Mataram	Pengadaan Alat-Alat/Perlengkapan Budidaya Ulat Sutra dengan Pakan Daun Singkong		7 jenis						
		Sosialisasi Budidaya Ulat Sutra dengan Pakan Daun Singkong		90 orang						
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya budaya tak benda yang dilestarikan		n/a	20	20				
2.22.08.1.08	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing		n/a						
2.22.08.1.08.02	Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Sumur bor dan instalasi jaringan air		n/a						
		Pengembangan wisata Tahura Bunder		n/a						
		Pemeliharaan Arboretum		n/a						
		Kajian Identifikasi Situs di Tahura		n/a						
		Identifikasi jenis kayu budaya langka untuk konservasi tanaman di DIY		n/a						
		Pemeliharaan Arboretum		n/a						
		Pengembangan wisata Tahura Bunder Tahap II		n/a						
		Instalasi Pengolahan Sampah Wanawisata Budaya Mataram		n/a						
2.22.08.1.09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Peningkatan kualitas pelestarian adat, seni, dan budaya								
2.22.08.1.09.23	Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Penanganan limbah infeksius Covid-19 pada Shelter Isolasi Mandiri		n/a						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis . Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022, indikator kinerja urusan lingkungan hidup adalah persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Sementara indikator kinerja urusan kehutanan adalah nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Indikator kinerja beserta target dan capaian realisasi hingga tahun 2024 berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Thn n-2 (2021)	Thn n-1 (2022)	Thn n (2023)	Thn n+1 (2024)	Thn n-2 (2021)	Thn n-1 (2022)	Thn n (2023)	Thn n+1 (2024)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	-	1. Nilai IKLH 2. Ketaatan Penanggung jawab usaha	Indikator Sasaran Strategis: 97,02 %	Indikator Sasaran Strategis: 100 %	n/a	n/a	Indikator Sasaran Strategis: 91,51 %	Indikator Sasaran Strategis: 91,51 %**)	n/a	n/a	Tahun 2023 – 2024 di luar periode RPJMD 2017 - 2022
				IKK: 1. 64,18 2. 52,5%	IKK: 1. 66,15 2. 56,25%	IKK: 1. Cukup Baik 2. 35%	IKK: 1. Cukup Baik 2. 37,5%	IKK: 1. 60,53 2. 55 %	IKK: 1. 60,53**) 2. 55%**)	n/a	n/a	
2.	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY	-	1. Peningkatan akses legal ke masyarakat 2. Persentase Kerusakan Hutan 3. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Indikator Sasaran Strategis: 756,975 juta rupiah	Indikator Sasaran Strategis: 756,975 juta rupiah	n/a	n/a	Indikator Sasaran Strategis: 955,42479 juta rupiah*)	Indikator Sasaran Strategis: 955,42479 juta rupiah**)	n/a	n/a	
				IKK: 1. n/a 2. 0,1% 3. n/a	IKK: 1. n/a 2. 0,1% 3. n/a	IKK: 1. n/a 2. 0,1% 3. n/a	IKK: 1. n/a 2. 0,1% 3. n/a	IKK: 1. 100 % 2. 2,15 % 3. 3,41 %	IKK: 1. 1. 100 %**) 2. 2,15%**) 3. 3,41 %**)	n/a	n/a	

*)angka sementara, hasil proyeksi

**)disamakan dengan angka tahun sebelumnya

2.2.1. Urusan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2021, target kinerja OPD urusan lingkungan hidup belum terpenuhi karena hanya mencapai 91,51 % yaitu dari target 97,02 % terealisasi sebesar 94,32 %. Sementara, persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, masih terdapat selisih 8,49 %.

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra dikalikan 100%.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari analisis data kualitas air sungai yang dipantau pada 10 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi. Adapun 10 sungai yang dipantau adalah : Sungai Oyo, S. Kuning, S. Tambakbayan, S. Gajahwong, S. Belik, S. Code, S. Winongo, S. Bedog, S. Konteng, dan S. Bulus. Kesepuluh sungai tersebut dipantau dalam 3 (tiga) periode yaitu Bulan Juni, Agustus, dan Oktober mewakili 2 musim (musim penghujan dan musim kemarau) dan pancaroba. Parameter kualitas air sungai yang dianalisis berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2018, terdiri dari: 6 parameter fisik (temperatur, bau, kekeruhan, warna, TDS, TSS); 28 parameter kimia (DO, BOD, COD, TSS, TDS, PO₄, dst.); 2 parameter mikrobiologi : Fecal Coli dan Total Coliform. Namun, untuk keperluan perhitungan IKA hanya meliputi 7 (tujuh) parameter, yaitu : TSS, DO, BOD, COD, PO₄, Fecal Coli dan Total Coliform.
2. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) utama, yaitu Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam perhitungan IKLH ini hanya menggunakan dua parameter², yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota dikolaborasi dengan hasil pengukuran kualitas udara ambien metode *passive* yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode *passive* mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan. Rumus untuk menghitungnya : $IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$

² sesuai dengan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pasal 10 huruf b

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU nomer 41 tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah. Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data citra satelit dari KLHK RI dan hasil Kajian Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DIY yang disusun oleh BLH DIY tahun 2018. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan hutan dan tutupan vegetasi lainnya. Luas tutupan vegetasi non hutan dilakukan konversi performa sesuai dengan kategorisasinya. Luas tutupan lahan non hutan hasil konversi dijumlah dengan luas hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka Tutupan Hutan (TH).

Dalam perhitungan IKTL diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas wilayah administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepada Papua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50%. Maka untuk menghitung IKTL digunakan rumus : $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$.

2.2.2. Urusan Kehutanan

Ditinjau dari aspek pengelolaannya hutan di DIY dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Hutan Negara dan Hutan Rakyat dengan total luasan 98.396,53 ha. Luasan hutan negara cenderung tetap yaitu seluas 19.133,95 ha yang dikelola oleh (1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta seluas 15.817,08 ha, (2) Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder seluas 634,1 ha, serta (3) UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di DIY seluas 2.682,77 ha. Jenis vegetasi dominan di wilayah hutan negara adalah jati, kayu putih dan pinus.

Sedangkan luas hutan rakyat di DIY pada tahun 2020 seluas 79.262,58 ha yang tersebar di 4 (empat) kabupaten. Luasan hutan rakyat terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 54.548,904 ha, disusul oleh Kabupaten Kulon Progo dengan luasan 12.338,347 ha, Kabupaten Bantul dengan luas 9.905,811 ha, dan Kabupaten Sleman dengan luasan

2.469,518 ha. Jenis vegetasi hutan rakyat di DIY antara lain jati, sonokeling, mahoni, gliricidea, akasia, dan bambu.

Realisasi nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 994,779 juta rupiah maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2021 dengan persentase realisasi sebesar 131,41 %. Sementara itu, nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan sebesar 764.545 juta rupiah. Maka jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka capaian sebesar 130,11 %.

Angka realisasi ini berkontribusi sebesar 6,82 % terhadap capaian angka PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Angka realisasi ini juga meningkat sebesar 4,12% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 955,420 juta rupiah. Peningkatan ini juga relevan dengan capaian kinerja usaha kehutanan terhadap perekonomian secara nasional pada tahun 2021 dimana pada kuartal ketiga usaha kehutanan memberikan pertumbuhan sebesar 0,17%, sehingga memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ketiga sebesar 3,51%.

Untuk mendapatkan proyeksi nilai PDRB subsektor kehutanan pada tahun 2021, maka diperlukan data mentah berupa nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan data series tersebut diperoleh laju PDRB yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel III.12 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 – 2020

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kehutanan dan Penebangan Kayu (juta rupiah)	649,3378	684,6739	707,7838	750,2077	816,3865	902,9034	955,185	1.004,9449	1.020,2624	1.086,9681	955,42
2.	Laju PDRB	-	0,054418671	0,033753149	0,059939066	0,088213971	0,105975417	0,057903869	0,052094516	0,015242129	0,065380926	-0,1210
3.	Laju PDRB rata-rata : 0,0411											

Laju PDRB rata – rata menjadi faktor pengali untuk menghitung nilai PDRB Subsektor Kehutanan Tahun 2021 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai proyeksi PDRB Tahun } n = (\text{Laju PDRB Rata-rata} \times \text{Nilai PDRB Tahun } n-1) + \text{Nilai PDRB Tahun } n-1$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai proyeksi PDRB Tahun 2021} &= (0,0411 \times 955.424,28) + 955.424,28 \\ &= 994.779,00 \end{aligned}$$

Dengan paradigma pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan, maka spektrum usaha kehutanan sangat luas dan dapat beririsan dengan sektor lain sehingga membentuk konfigurasi baru

di bidang pangan, farmasi, energi, dan jasa pariwisata. Karena nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY dalam laporan ini masih berupa hasil proyeksi, maka data gambaran kinerja subsektor kehutanan DIY secara lebih holistik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-6 Komponen Penyumbang PDRB yang berasal dari Urusan Kehutanan

No.	Uraian	Volume		
		2019	2020	2021
1.	Produksi kayu bulat (m³)	154.210,60	71.335,54	97.986,34
a.	Kayu Bulat Hutan Negara	1.103,90	2.249,84	2.566,26
b.	Kayu Bakar Hutan Negara	37,38	0,00	0,00
c.	Kayu Bulat Hutan Rakyat	153.069,32	69.085,70	95.420,08
2.	Produksi kayu olahan (m³)	24.090,41	26.715,31	10.488,1
a.	Kayu Gergajian/ <i>Swan Timber</i> (m ³)	6.171,34	3.931,62	2.982,38
b.	Kayu lapis/ <i>plywood</i> (m ³)	1.065,10	4.956,46	1.812,20
c.	<i>Veneer</i> (m ³)	1.065,12	1.211,98	
d.	<i>Barecore</i> (m ³)	15.788,85	16.493,30	5.290,19
e.	<i>Blockboard</i> (m ³)	0	121,95	403,33
3.	Produksi hasil hutan non kayu			
a.	Minyak kayu putih (liter)	39.323	40.353	42.317
b.	Bambu (batang)	127.330	477.493	477.493*)
4.	Jasa Lingkungan (Rp)	2.454.374.875	409.761.125	1.043.337.375
a.	Pengelolaan Hutan Mangunan	2.411.134.750	403.917.625	1.037.791.000
b.	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	21.874.375	1.580.750	580.625
c.	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	21.365.750	4.262.750	4.849.500
d.	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bibal			116.250

*) *Angka Sementara*

Sumber: *Data Statistik DLHK DIY, 2021 (diolah)*

Angka realisasi produksi kayu bulat tahun 2021 meningkat jika dibandingkan angka produksi tahun 2020, yaitu dari yang sebelumnya sebesar 71.335,54 m³ menjadi 97.986,34 m³ dengan persentase kenaikan sebesar 137,36 %. Kenaikan yang signifikan terjadi dari sektor kayu bulat hutan rakyat yaitu dari 69.085,70 m³ menjadi 95.420,08 m³ dengan proporsi 97,38% dari total kayu bulat yang dihasilkan. Peningkatan ini terjadi karena kebutuhan pasar akan kayu juga meningkat seiring dengan mulai menggeliatnya perekonomian setelah sebelumnya terpukul karena efek pandemi covid-19. Di sisi lain produksi kayu olahan justru menurun yaitu dari 26.715,31 m³ menjadi 10.488,1 m³. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kayu DIY lebih banyak yang terjual dalam bentuk log dibandingkan olahan.

Produksi kayu bulat di hutan negara juga meningkat namun relatif sedikit dan berasal dari tebangan yang sudah direncanakan maupun tebangan tak tersangka. Tebangan tak tersangka merupakan akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dengan barang

bukti yang dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati, namun potensinya masih relatif kecil.

Sub sektor kehutanan juga berkontribusi terhadap sektor industri olahan yang berasal dari produksi kayu olahan dan dari industri minyak kayu putih. Produksi kayu olahan antara lain berasal dari kayu gergajian, kayu lapis, *venner*, *barecore*, dan *blockboard*. Produksi kayu olahan tahun 2021 mengalami penurunan produksi menjadi sebesar 10.488,1 m³ jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 26.715,31 m³.

Pemanfaatan jasa lingkungan di dalam Kawasan hutan produksi dan hutan lindung berupa wisata alam juga mengalami peningkatan di tahun 2021 setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 2020 lalu. Hingga akhir Desember 2021 pendapatan yang diperoleh dari jasa lingkungan sebesar Rp.1.043.337.375,- meningkat 254,62% jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 409.761.125,-. Kenaikan jumlah kunjungan ini tidak lepas dari pelanggaran pembatasan sosial di DIY.

Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik, hasil hutan non kayu adalah semua material biologi selain kayu yang diambil dari Kawasan hutan. Produksi hasil hutan non kayu yang berhasil terdata adalah produksi bambu dan produksi minyak kayu putih. Untuk nilai produksi bambu tahun 2021 masih menggunakan angka tahun lalu. Sementara untuk data produksi minyak kayu putih hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel III.14 Produksi Minyak Kayu Putih Tahun 2015 - 2021

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019	39.316	39.323	9.889.734.500
2020	41.610	40.353	10.756.185.000
2021	42.310	42.317	10.930.218.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Berdasarkan tabel di atas realisasi produksi minyak kayu putih tahun 2021 meningkat sebanyak 1.964 liter jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, serta melebihi target yang ditentukan untuk tahun 2021 sebesar 42.310 dengan persentase 102,38%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLHK DIY adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a. Penjabaran (*cascading*) terkait pelaksanaan beberapa program dan kegiatan belum secara logis menunjukkan keterkaitan sebab-akibat (*causality*) maupun keterkaitan sinergitas (*alignment*)
- b. Beberapa permasalahan yang dihadapi tidak cukup diatasi dengan penanganan jangka pendek sehingga perlu pemilihan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menyusun program dan kegiatan agar mampu merespon hal tersebut
- c. Bertambahnya jumlah penduduk permanen dan sementara di DIY yang membutuhkan tempat tinggal mempengaruhi perluasan kebutuhan tempat tinggal. Lahan pertanian dan lahan untuk upaya konservasi semakin berkurang dan digantikan menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan tempat dan aktivitas sosial ekonomi. Beban pencemaran air dan udara semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi. Alih fungsi lahan, peningkatan beban pencemaran berimplikasi negatif terhadap nilai indeks kualitas lingkungan hidup daerah
- d. Kerusakan lahan akibat penambangan tanpa ijin terjadi di Kab. Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul dan Bantul. Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan ini sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan dimana masyarakat melakukan demonstrasi penolakan terhadap aktivitas penambangan tanpa ijin tersebut. Adanya kegiatan penambangan tanpa izin menyebabkan pengelolaan tambang tidak sesuai prosedur. Kegiatan tambang yang dilakukan hanya mementingkan aspek keuntungan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Adapun jenis penambangan lainnya dengan status tanpa izin yaitu penambangan tanah urug yang mengakibatkan adanya bekas-bekas galian dan berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor, kerusakan fasilitas umum seperti jalan dan lahan area tambang menjadi rusak
- e. Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang masuk kategori taat izin lingkungan
- f. Konflik tenurial pada areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan di DIY. Terjadinya penggunaan lahan tanpa ijin/penyerobotan lahan dan aksi sabotase terhadap tanda batas kawasan hutan merupakan akibat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan yang hidupnya bergantung pada hutan. Diperlukan langkah – langkah resolusi yang

strategis namun juga tetap dapat memenuhi prinsip keadilan sosial untuk mencegah konflik ini menjadi berkepanjangan

- g. Berdasarkan perhitungan dengan metode indeks pencemaran dan metode storet dihubungkan dengan kualitas air sungai hasil ketetapan Gubernur DIY diketahui bahwa pencemaran air di 10 sungai di DIY berada dalam kondisi tercemar. Parameter bakteri koli tinja (*Fecal coliform*) dan total koli (*Total coliform*) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar. Tingginya parameter bakteri koli menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik dan kesadaran masyarakat masih kurang.
- h. Perhitungan nilai PDRB sub sektor kehutanan masih bertumpu pada produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini mengesankan bahwa kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB masih bersifat ekstraktif. Padahal, pada kenyataannya DLHK DIY telah berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan jasa lingkungan hutan kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
- i. TPA Regional Piyungan merupakan tempat untuk pengelolaan akhir sampah yang bersumber dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, sudah dinyatakan *overload*, sehingga diperlukan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai di TPA sebelum ditangani dengan skema KPBU.

2. Hambatan

- a. Kerjasama multipihak masih terhambat oleh adanya pemikiran sektoral yang memandang masalah lingkungan dan kehutanan semata-mata sebagai tanggung jawab instansi lingkungan hidup dan kehutanan
- b. Meskipun pemerintah pusat sudah mencanangkan program Satu Data Indonesia (SDI) sejak tahun 2019, akan tetapi implementasinya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan masih terhambat oleh belum optimalnya interoperabilitas antar lembaga/organisasi dan belum familiernya investasi pada infrastruktur digital di lembaga pemerintah untuk mendukung pengelolaan data
- c. Belum semua kepala daerah (kabupaten/kota) bersedia menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggar hukum lingkungan karena dianggap dapat menghambat investasi;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DLHK DIY

a. Tantangan

- 1) Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak serius terhadap sektor ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta turut pula mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah
- 2) Dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) maka terdapat beberapa ketentuan baru yang harus diantisipasi misalnya mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan mekanisme perizinan lingkungan yang disederhanakan

b. Peluang

- 1) Konsep perhutanan sosial yang semakin diperkuat dengan adanya payung hukum melalui Peraturan Menteri LHK dan menjadi prioritas nasional RPJMN 2015 – 2019
- 2) DIY merupakan rumah bagi institusi pendidikan tinggi terkemuka dan pusat – pusat penelitian yang dapat diajak bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
- 3) Pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah meningkatkan peluang keterlibatan masyarakat dari berbagai golongan umur, jenis kelamin, dan kemampuan tubuh untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- 4) Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta dapat diandalkan (*reliable*) sesuai dengan prinsip – prinsip *good governance*

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut di atas maka isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DLHK DIY tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya pandemi yang belum ada tanda – tanda akan mereda, maka penyelenggaraan program dan kegiatan akan dibuat seefektif dan seefisien mungkin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- b. Peningkatan kenyamanan bangunan di lingkungan kerja dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kerja untuk mendukung produktivitas kerja;

- c. Obyek/penerima manfaat dari program dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan akan lebih banyak melibatkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan gender;
- d. Untuk menangani TPA Regional Piyungan yang telah overload, maka prioritas pendanaan pengelolaan sampah di TPA Piyungan untuk tahun 2022 adalah untuk penambahan sarana dan prasarana khususnya alat berat yang digunakan untuk penataan sampah agar operasionalisasi TPA tetap berjalan dan dapat melayani masyarakat sampai proses KPBU terealisasi;
- e. Dengan diberlakukannya sistem kodefikasi yang baru maka penyusunan program/kegiatan untuk tahun 2023 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara terperinci review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 jika dibandingkan dengan hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2-7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				102.841.3 38.579	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				79.961.5 47.149	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				81.051.44 5.279	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				71.897.5 30.343	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				396.000.0 00	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
2.1.11.01.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	30	396.000.0 00	n/a	n/a	n/a	n/a	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.10.1.11.01.00. 11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				396.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
2.10.1.11.01.00. 11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	9	396.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				76.880.251.279	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				68.795.836.343	
2.11.1.11.01.00. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24	51.685.800.079	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24	47.490.380.443	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				126.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.565.900	
2.11.1.11.01.00.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	18.761.400	
2.11.1.11.01.00.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
2.11.1.11.01.00.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	2	4.383.200	
2.11.1.11.01.00.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
2.11.1.11.01.00.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	65.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	23.421.300	
2.11.1.11.01.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	45.135.160.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	42.796.132.929	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	45.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	42.674.392.929	
2.11.1.11.01.00.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	104.160.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	100.740.000	
2.11.1.11.01.00.01.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	3.000.000	
2.11.1.11.01.00.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	14	28.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	14	18.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			n/Semesteran SKPD					n/Semesteran SKPD			
2.11.1.11.01.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				62.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				67.800.000	
2.11.1.11.01.00.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	62.400.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	67.800.000	
2.11.1.11.01.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.027.407.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				502.006.500	
2.11.1.11.01.00.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	51.721.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	52.955.000	
2.11.1.11.01.00.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	150.275.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	98.471.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	165.627.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	75.030.300	
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	101.358.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	60.000.000	
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	2	8.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	1	9.710.400	
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	550.026.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	205.839.000	
2.11.1.11.01.00. 01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				877.974.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.459.100	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	301.880.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	21.210.700	
2.11.1.11.01.00.01.1.07.008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DIY	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	50.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
2.11.1.11.01.00.01.1.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
2.11.1.11.01.00.01.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	501.094.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	54.248.400	
2.11.1.11.01.00.01.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	25.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.631.103.999	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.850.760.974	
2.11.1.11.01.00.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.680.000	
2.11.1.11.01.00.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	812.034.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	841.334.200	
2.11.1.11.01.00.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.813.569.799	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2.005.746.774	
2.11.1.11.01.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.825.755.080	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.151.655.040	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00. 01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	18.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	18.446.300	
2.11.1.11.01.00. 01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	181	940.106.680	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	259	614.840.440	
2.11.1.11.01.00. 01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	324	291.958.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	372	213.368.300	
2.11.1.11.01.00. 01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	575.240.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	305.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Ketercapaian sasaran program perencanaan lingkungan hidup (%)	30%	340.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Ketercapaian sasaran program perencanaan lingkungan hidup (%)	30%	217.268.400	
2.11.1.11.01.00.02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				265.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				85.000.000	
2.11.1.11.01.00.02.01.001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacro	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun (dokumen)	2	265.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacro	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun (dokumen)	1	85.000.000	
2.11.1.11.01.00.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				75.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				132.268.400	
2.11.1.11.01.00.02.1.02.001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	DIY	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat	1	75.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	DIY	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat	1	30.261.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			dan Laut yang Disusun					dan Laut yang Disusun			
2.11.1.11.01.00. 02.1.02.002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DIY	Jumlah Dokumen KLHSRPJPD/RPJ MD Provinsi yang Disusun	0	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DIY	Jumlah Dokumen KLHSRPJPD/RPJ MD Provinsi yang Disusun	1	102.007.200	
2.11.1.11.01.00. 02.1.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Ketercapaian sasaran program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH (%)	100	4.136.625.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Ketercapaian sasaran program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH (%)	100	1.378.856.600	
2.11.1.11.01.00. 03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				3.749.640.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.310.266.300	
2.11.1.11.01.00. 03.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	DIY	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	328.360.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	DIY	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	145.516.900	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Tanah, Air, Udara, dan Laut					Tanah, Air, Udara, dan Laut					
2.11.1.11.01.00. 03.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1	125.280.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2	60.000.000	
2.11.1.11.01.00. 03.1.01.003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	DIY	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2	3.296.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	DIY	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2	1.104.749.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00. 03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (titik)	50	386.985.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (titik)	50	68.590.300	
2.11.1.11.01.00. 03.1.02.003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DIY	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50	386.985.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DIY	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50	68.590.300	
2.11.1.11.01.00. 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah fasilitas persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (%)	100	150.390.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah fasilitas persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (%)	100	13.258.000	
2.11.1.11.01.00. 05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya fasilitas persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (dokumen)	1	150.390.000	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya fasilitas persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (dokumen)	1	13.258.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
2.11.1.11.01.00.05.1.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DIY	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik Terintegrasi Secara	1	150.390.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DIY	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik Terintegrasi Secara	1	13.258.000	
2.11.1.11.01.00.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN		Persentase capaian pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	62,5	565.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN		Persentase capaian pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	62,5	160.252.200	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
2.11.1.11.01.00.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Terlaksananya pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan (%)	100	565.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Terlaksananya pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan (%)	100	160.252.200	
			Terlaksananya pengawasan usaha/ kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (usaha/kegiatan)	30				Terlaksananya pengawasan usaha/ kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (usaha/kegiatan)	30		
2.11.1.11.01.00.06.1.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	DIY	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis,	1 dokumen	379.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	DIY	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis,	1	85.264.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan			Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan			
2.11.1.11.01.00.06.1.01.002	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	DIY	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 orang	84.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	DIY	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	35	14.425.700	
2.11.1.11.01.00.06.1.01.003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DIY	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 laporan	102.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DIY	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1	60.562.500	
2.11.1.11.01.00.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN		Persentase ketercapaian pembinaan kelompok masyarakat (%)	21,05	120.831.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN		Persentase ketercapaian pembinaan kelompok masyarakat (%)	21,05	114.742.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	HIDUP UNTUK MASYARAKAT					HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
2.11.1.11.01.00.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (kelompok)	40	120.831.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (kelompok)	45	114.742.000	
2.11.1.11.01.00.08.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	DIY	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	40	120.831.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	DIY	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	45	114.742.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Ketercapaian target penghargaan LH tingkat nasional (%)	100	588.993.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Ketercapaian target penghargaan LH tingkat nasional (%)	100	112.151.700	
2.11.1.11.01.00.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya penambahan penghargaan LH tingkat nasional (penghargaan)	3	588.993.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya penambahan penghargaan LH tingkat nasional (penghargaan)	3	112.151.700	
2.11.1.11.01.00.09.1.01.001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DIY	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (entitas)	35	588.993.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DIY	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (entitas)	35	112.151.700	
2.11.1.11.01.00.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	100	90.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	100	27.227.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.11.1.11.01.00. 10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup (%)	100	90.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup (%)	100	27.227.800	
2.11.1.11.01.00. 10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi		Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani (dokumen)	1	90.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi		Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani (dokumen)	1	27.227.800	
2.11.1.11.01.00. 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah yang terkelola (%)	100	19.202.112.200	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah yang terkelola (%)	100	19.281.699.200	
2.11.1.11.01.00. 11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional (%)	100	19.202.112.200	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional (%)	100	19.281.699.200	
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	DIY	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	3	754.675.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			yang Disusun dan Ditetapkan								
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	DIY	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	700	7.696.046 .100	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	DIY	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	700	9.175.74 7.000	
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	DIY	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (unit)	1	4.624.422 .300	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	DIY	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (unit)	1	10.000.0 00.000	
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	DIY	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	700	60.195.60 0	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	DIY	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	700	52.652.2 00	
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	6	6.066.773 .200	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	6	53.300.0 00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.775.194.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.101.694.000	
2.22.1.11.01.00.08	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7	3.775.194.000	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7	3.101.694.000	
2.22.1.11.01.00.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)	82	537.000.000	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)	82	98.000.000	
2.22.1.11.01.00.08.5.01.003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	DIY	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	0	537.000.000	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	DIY	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	0	98.000.000	
2.22.1.11.01.00.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100	789.444.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100	614.444.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2.22.1.11.01.00. 08.5.08.006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	DIY	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	2	789.444.000	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	DIY	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	2	614.444.000	
2.22.1.11.01.00. 08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Hasil Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13	2.448.750.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Hasil Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13	2.389.250.000	
2.22.1.11.01.00. 08.5.09.009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	DIY	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1	2.448.750.000	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	DIY	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1	2.389.250.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				21.789.893.300	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.064.016.806	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				21.789.893.300	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				8.064.016.806	
3.28.1.11.01.00. 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase ketercapaian program pengelolaan hutan (%)	69,33	17.554.676.000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase ketercapaian program pengelolaan hutan (%)	69,33	6.697.946.506	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
3.28.1.11.01.00. 03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH (dokumen)	2	1.062.720.000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH (dokumen)	2	122.555.400	
3.28.1.11.01.00. 03.1.02.001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DIY	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	1.062.720.000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DIY	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	122.555.400	
3.28.1.11.01.00. 03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Terlaksananya produksi hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan (Rp)	11.981.782.825	10.779.900.000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Terlaksananya produksi hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan (Rp)	11.981.782.825	5.313.074.620	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	50.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	DIY	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	43	98.900.000	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	DIY	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	43	15.434.100	
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	DIY	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	8	17.000.000	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	DIY	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	8	3.516.700	
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	DIY	Jenis Pemanfaatan	1	8.559.000.000	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	DIY	Jenis Pemanfaatan	1	4.701.415.620	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	DIY	Jenis Pemanfaatan	1	2.055.000.000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	DIY	Jenis Pemanfaatan	1	592.708.200	
3.28.1.11.01.00. 03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)	275	3.245.470.000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)	275	463.722.500	
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	DIY	Jumlah dokumen pelaksanaan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	5	565.000.000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	DIY	Jumlah dokumen pelaksanaan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	5	23.341.200	
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DIY	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	200	524.070.000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DIY	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	245	202.235.200	
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	DIY	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	30	463.400.000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	DIY	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	30	70.594.000	
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	DIY	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	7	138.000.000	n/a	n/a	n	n/a	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	DIY	Jumlah bibit tanaman yang bersertifikat	400000	1.555.000.000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	DIY	Jumlah bibit tanaman yang bersertifikat	350000	167.552.100	
3.28.1.11.01.00. 03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Terlaksananya penataan kawasan hutan (%)	90,22	1.936.450.000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Terlaksananya penataan kawasan hutan (%)	90,22	641.092.700	
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DIY	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15581	989.000.000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DIY	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15581	454.263.100	
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DIY	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	15581	638.200.000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DIY	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	15581	173.923.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	DIY	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan (operasi)	12	30.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DIY	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1	104.250.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan	DIY	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1	175.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan	DIY	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1	12.906.400	
3.28.1.11.01.00. 03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas		Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000	13	260.000.000	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas		Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000	13	78.429.286	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Produksi <6000 m3/Tahun		m3/Tahun (unit manajemen)			Produksi <6000 m3/Tahun		m3/Tahun (unit manajemen)			
3.28.1.11.01.00.03.1.07.001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	DIY	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	13	65.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
3.28.1.11.01.00.03.1.07.002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	DIY	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	195.000.000	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	DIY	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	78.429.286	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
3.28.1.11.01.00.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan		Terlaksananya penambahan usaha perbenihan terdaftar (usaha)	16	270.136.000	Perbenihan Tanaman Hutan		Terlaksananya penambahan usaha perbenihan terdaftar (usaha)	16	79.072.000	
3.28.1.11.01.00.03.1.09.002	Sertifikasi Sumber Benih	DIY	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1	70.150.000	Sertifikasi Sumber Benih	DIY	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1	19.497.400	
3.28.1.11.01.00.03.1.09.003	Sertifikasi Mutu Benih	DIY	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1	31.500.000	Sertifikasi Mutu Benih	DIY	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1	10.873.800	
3.28.1.11.01.00.03.1.09.004	Sertifikasi Mutu Bibit	DIY	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	1	35.000.000	Sertifikasi Mutu Bibit	DIY	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	1	12.653.400	
3.28.1.11.01.00.03.1.09.005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	DIY	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1	85.000.000	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	DIY	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1	17.637.000	
3.28.1.11.01.00.03.1.09.006	Pembangunan Sumber Benih	DIY	Luas Sumber Benih yang Dibangun	5	48.486.000	Pembangunan Sumber Benih	DIY	Luas Sumber Benih yang Dibangun	5	18.410.400	
3.28.1.11.01.00.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di TAHURA dan Jumlah Kawasan Bernilai Ekosistem	68,53	3.915.400.000	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di TAHURA dan Jumlah Kawasan Bernilai Ekosistem	68,53	402.322.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola					Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola			
3.28.1.11.01.00.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Terlaksananya Peningkatan Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (%)	65	477.400.000	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Terlaksananya Peningkatan Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (%)	65	219.293.000	
3.28.1.11.01.00.04.1.01.001	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	DIY	Jumlah laporan pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	1	174.900.000	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	DIY	Jumlah laporan pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	1	94.058.500	
3.28.1.11.01.00.04.1.01.003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	DIY	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	6	151.000.000	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	DIY	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	6	107.686.900	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
3.28.1.11.01.00. 04.1.01.008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	DIY	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5	151.500.000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	DIY	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4	17.547.600	
3.28.1.11.01.00. 04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Terlaksananya Penambahan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	3	3.438.000.000	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Terlaksananya Penambahan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	3	183.029.500	
3.28.1.11.01.00. 04.1.03.001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1	150.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
3.28.1.11.01.00. 04.1.03.002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	DIY	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	10	450.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
3.28.1.11.01.00. 04.1.03.003	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	10	735.000.000	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	4	74.725.700	
3.28.1.11.01.00. 04.1.03.004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	DIY	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	21	1.108.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
3.28.1.11.01.00. 04.1.03.005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	DIY	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	90 orang	500.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	0	
3.28.1.11.01.00. 04.1.03.006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	DIY	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10 ha	495.000.000	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	DIY	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10	108.303.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
3.28.1.11.01.00.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	22,17	319.817.300	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	22,17	963.747.800	
3.28.1.11.01.00.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat (kelompok)	15	319.817.300	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat (kelompok)	15	963.747.800	
3.28.1.11.01.00.05.1.01.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DIY	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	57	130.427.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DIY	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	57	42.881.600	
3.28.1.11.01.00.05.1.01.002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	DIY	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti	35	189.390.300	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	DIY	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti	35	920.866.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Kelompok Tani Hutan		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan			Kelompok Tani Hutan		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari proses partisipatif dalam penyusunan Renja DLHK DIY Tahun 2023, pada tanggal 24 Februari 2022 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah untuk menggali aspirasi dari para pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah dalam lingkup Pemda DIY, Kabupaten/kota di DIY, dan instansi vertikal, serta pihak swasta, akademisi dan kelompok masyarakat. Berikut ini usulan program dan kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas wilayah yang merupakan hasil kesepakatan dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan DLHK DIY.

Tabel 2-8 Usulan Program dan Kegiatan yang Masuk melalui Forum OPD DLHK DIY

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Kajian Enterprise Architecture Smart Environment	DIY	-	1 dokumen	Berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Kominfo DIY terhadap progress Jogja Smart Province di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Diakomodir dalam bentuk kajian.
2.	Operasi dan Penataan Landfill zona B TPA Piyungan	TPA Piyungan	-	12 bulan	Merupakan usulan dari Balai Pengelolaan Sampah,
3.	Dokumen Mitigasi Perubahan Iklim	DIY	-	1 dokumen	Merupakan hasil evaluasi dari Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, KLHK. Diimplementasikan dalam bentuk tindakan yang lebih kongkrit
4.	Pembangunan Monumen Antroposen	Desa Bawuran, Piyungan, Bantul	-	1 kegiatan	Merupakan usulan dari Lurah Desa Bawuran, disarankan untuk masuk melalui Dana Keistimewaan
5.	Pengelolaan limbah B3 medis dari isoman	DIY	-	1 kegiatan	Merupakan usulan Dinas Kesehatan DIY, tetapi tidak diakomodir karena masuk dalam penganggaran BPBD DIY

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2024 sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 2007, untuk tahun 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tema RPJMN 2020-2024 sendiri adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” dengan prioritas (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, (2) Membangun karakter bangsa, (3) Memperkuat ketahanan ekonomi, (4) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (5) Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Memperkuat stabilitas polhukan dan transformasi pelayanan publik, (7) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sementara itu, penekanan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2020 – 2025 adalah “Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana – sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.”

Sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 diperintahkan agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2023 – 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023 – 2026. Berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kekhususan Daerah Istimewa

Yogyakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diangkat melalui penetapan dan bukan melalui mekanisme pemilihan umum. Oleh karena itu, maka masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dianggap berhenti pada tahun 2022 namun kemudian melanjutkan masa jabatannya kembali melalui penetapan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah DIY juga harus menyesuaikan periodisasi dokumen perencanaan jangka menengahnya sesuai dengan instruksi tersebut di atas.

Untuk dapat menyelaraskan tema kebijakan nasional tahun 2023 dengan tema kebijakan daerah maka disusunlah penyandingan sebagai berikut:

Tabel 3-1 Penyandingan tema kebijakan nasional tahun 2023 dengan tema kebijakan daerah tahun 2023

Tema RKP 2023	Arahan Pemerintah Pusat untuk Isu Strategis DIY Tahun 2023	Arah Pembangunan DIY 2022 – 2027	Isu Strategis DIY Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya infrastruktur layanan dasar b. Kurangnya kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin c. Masih rendahnya pemerataan penanganan terhadap PMKS 2. Kurangnya akses layanan infrastruktur ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya konektivitas antar wilayah b. Belum meratanya akses koneksi internet c. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Reformasi Terbatas Kalurahan 3. Fokus pada Wilayah Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Wilayah Selatan DIY b. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM c. Penanganan dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid 19 d. Respon Peluang Transnasional e. Percepatan pembangunan perdesaan f. Produktivitas UMKM yang Belum Optimal g. Perkembangan Teknologi Informasi h. Penyederhanaan Birokrasi dan Pemerintahan Simetris-Asimetris i. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan j. Kebudayaan k. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber:

1. Sidang Kabinet Paripurna Tahun 2022
2. Kick Off Meeting RKPDIY 2023
3. Forum OPD DLHK DIY Tahun 2022

Adapun Tema Pembangunan DIY Tahun 2023 didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 (yang disusun berpedoman pada Sasaran Pembangunan Tahap Keempat RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024), serta memperhatikan terhadap Tema RKP Tahun 2023. Indikasi Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan.”** DLHK DIY

diamanatkan untuk berkontribusi terhadap ketercapaian program prioritas pembangunan daerah 2023 – 2026.

Tabel 3-2 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda
Meningkatkan Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Angka Inclusive Growth Index (IGI) 6,2 (2022) menjadi 6,64 (2026)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Program Pengembangan Sektor Unggulan
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah
			Indeks Gini	Program Penumbuhan Wirausaha Baru
			Indeks Williamson	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan
			Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Program Pengurangan Emisi Karbon
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
			Tingkat Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan
Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda Program Pembangunan Sosial Masyarakat		
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (good Government)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	Meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan	Opini BPK	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah
			Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023 - 2026

Sebagai instansi yang menaungi bidang urusan lingkungan hidup, sasaran strategis DLHK DIY berkolerasi langsung dengan Sasaran Pemerintah Daerah, yaitu Meningkatkan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan yang salah satu indikatornya yaitu nilai IKLH. Berdasarkan hasil evaluasi pada periode RPJMD 2017 – 2022, ketercapaian nilai IKLH termasuk kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran dan sulitnya menaikkan kualitas lingkungan hidup di tengah gempuran pembangunan yang masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta adanya desakan faktor demografis yang sulit untuk diantisipasi. Oleh karena itu, maka ketercapaian indikator sasaran nilai IKLH perlu didekati dengan target yang lebih realistis namun tetap ideal, yaitu dengan menerapkan target yang bersifat kualitatif berdasarkan nilai kisaran/kategorisasi. Adapun rincian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 3-3 Indikator Kinerja Utama Pemda DIY Tahun 2023 - 2026

No	Indikator Sasaran	Baseline	Target			
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45	4,69	5,01	5,25	5,57
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4	3,8	3,6	3,4	3,2
3	Indeks Gini	0,426	0,423	0,419	0,415	0,411
4	Indeks Williamson	0,447	0,444	0,441	0,438	0,435
5	Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik	Cukup baik
6	Indeks Pembangunan Manusia	80,63	81,07	81,52	81,96	82,40
7	Tingkat Kemiskinan	11,5	11,1	10,7	10,3	9,9
8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18
9	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA	AA	AA	AA

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023 - 2026

Arah kebijakan nasional dan daerah di atas menjadi acuan dan perhatian DLHK DIY dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2023 sehingga program kegiatan yang disusun diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia dan turut berkontribusi terhadap sasaran nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan DLHK DIY dalam kurun waktu tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mewujudkan tata kelola hutan lestari

Berdasarkan tujuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran strategis perangkat daerah tahun 2023 – 2026 dengan target yang harus dicapai tiap tahunnya. Adapun Sasaran Strategis DLHK DIY untuk Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-4 Sasaran Strategis DLHK DIY Tahun 2023

Tabel 3-5 Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator	Target Kinerja Sasaran 2023
1.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Capaian Kinerja Perencanaan LH + Pengendalian Pencemaran + Pengelolaan Limbah B3 + Pembinaan dan Pengawasan Ijin LH + Pembinaan	77,15 %

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator	Target Kinerja Sasaran 2023
			Masyarakat + Penghargaan + Aduan Terlayani + Pengelolaan Sampah Regional	
2.	Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	Capaian Kinerja Pengelolaan Hutan + Pengelolaan Kawasan Konservasi + Peningkatan Kapasitas KTH	68,6 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Capaian Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun n	BB

Sumber: Renstra DLHK DIY Tahun 2023 - 2026

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup merepresentasikan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup yang diukur dari Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja tersebut terdiri dari capaian kinerja Perencanaan LH, Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah B3, Pembinaan dan Pengawasan Ijin LH, Pembinaan Masyarakat, Penghargaan, Aduan Terlayani, Pengelolaan Sampah Regional.

Sedangkan sasaran Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari merupakan perwujudan keberhasilan pengelolaan hutan di dalam maupun di luar kawasan berdasarkan prinsip tata kelola hutan lestari yang diukur dari Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari. Capaian Kinerja tersebut terdiri dari capaian kinerja Pengelolaan Hutan, Pengelolaan Kawasan Konservasi, Peningkatan Kapasitas KTH.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, capaian kategori reformasi birokrasi perangkat daerah menjadi penentu ketercapaian sasaran Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DLHK DIY Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta

indikasinya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung ketercapaian arah pembangunan DIY

Tahun 2023 merupakan tahun pertama periodisasi RPD DIY Tahun 2023 - 2026 sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 harus dapat mendukung ketercapaian arah pembangunan DIY 2022 – 2027³ yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Reformasi Terbatas Kalurahan dan Fokus pada Wilayah Selatan.

2. Mendukung ketercapaian SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia.

3. Mendukung ketercapaian sasaran strategis DLHK DIY

Sasaran strategis DLHK DIY seperti yang diamanatkan dalam Dokumen Renstra DLHK DIY Tahun 2023 – 2026.

4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

5. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah agar tercipta keserasian dan keterpaduan antara peraturan di tingkat daerah dengan pedoman dari pusat

Dengan beberapa pertimbangan di atas, maka pada tahun 2023 DLHK DIY:

1. Merumuskan 13 program, 29 kegiatan, dan 93 subkegiatan yang akan dijalankan oleh DLHK DIY pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

³ Berdasarkan paparan Bahan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang disampaikan oleh Bappeda DIY dalam *Kick Off Meeting* Penyusunan RKPD DIY Tahun 2023

- a. Urusan Lingkungan Hidup didanai dengan APBD Reguler sebanyak 9 program, 17 kegiatan, 65 subkegiatan
 - b. Urusan Kehutanan didanai dengan APBD Reguler sebanyak 3 program, 9 kegiatan, 25 subkegiatan
 - c. Urusan Kebudayaan yang didanai dengan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 sebanyak 1 program, 3 kegiatan, 3 subkegiatan
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan DLHK DIY pada tahun 2023 bersifat terdistribusi merata di seluruh kabupaten/kota dengan prioritas sisi selatan DIY.
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.79.961.547.149,-.

Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan DLHK DIY Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-6 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Pagu: Rp. 79.961.547.149,-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				68.795.836.343,00				21,000,268,900
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		94,24 Nilai	47.490.380.443,00			94,24 Nilai	261,550,000
2	1	1	1,0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	46.565.900,00			100%	128,500,000
2	1	0	1,0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	4 Dokumen	18.761.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	52,000,000

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	2 Dokumen	4.383.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	6,500,000
2	1	0	1.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22 Laporan	23.421.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Laporan	70,000,000
2	1	1	1,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah			42.796.132.929,00				33,500,000
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		300 Orang/ Bulan	42.674.392.929,00			300 Orang/ Bulan	0
2	1	0	1.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	100.740.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	0
2	1	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	3,500,000
2	1	0	1.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKP dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14 Laporan	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	30,000,000
2	1	1	1,0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			67.800.000,00				0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	0	1.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	67.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	0
2	1	1	1,0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			502.006.500,00				80,000,000
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	52.955.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	0
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	98.471.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	0
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	75.030.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	0
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	0
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	9.710.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	0

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	0	1.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	205.839.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	0
2	1	1	1,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.459.100,00				0
2	1	0	1.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	21.210.700,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	0
2	1	0	1.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		32 Unit	54.248.400,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		32 Unit	0
2	1	1	1,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.850.760.974,00				0
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.680.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	0
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	841.334.200,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	0

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	2.005.746.774,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	0
2	1	1	1,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.151.655.040,00				19,550,000
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	327.341.670,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	19,550,000
2	1	0	1.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		94 Unit	305.945.070,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94 Unit	0
2	1	0	1.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		258 Unit	213.368.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		258 Unit	0
2	1	0	1.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	305.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	0
2	1	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup		30 %	217.268.400,00			30 %	570,000,000

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	2	1,0	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya penyusunan dokumen dalam rangka penetapan RPPLH		2 Dokumen	85.000.000,00			2 Dokumen	400,000,000
2	1	0	1,0	0	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	400,000,000
2	1	2	1,0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Penyusunan laporan validasi KLHS dan dokumen KLHS		1 Dokumen	132.268.400,00			1 Dokumen	170,000,000
2	1	0	1,0	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	1 Dokumen	30.261.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	85,000,000
2	1	0	1,0	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	1 Dokumen	102.007.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	85,000,000
2	1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase capaian kinerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		100%	1.378.856.600,00			100%	2,734,695,500
2	1	3	1,0	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim		7 Dokumen	1.310.266.300,00			7 Dokumen	2,337,304,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	0	1.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	145.516.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	361,196,000
2	1	0	1.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	133,308,000
2	1	0	1.0	0	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	2 Dokumen	1.104.749.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,842,800,000
2	1	3	1,0		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		50 titik	68.590.300,00			50 titik	397,391,500
2	1	0	1.0	0	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Titik	68.590.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Titik	397,391,500
2	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase capaian kinerja fasilitas persetujuan teknis pengelolaan limbah B3		100%	13.258.000,00			100%	94,853,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	5	1,0	1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3		1 Dokumen	13.258.000,00			1 Dokumen	94,853,000
2	1	0	1.0	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.258.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	94,853,000
2	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup		62.5 %	160.252.200,00			62.5 %	520,500,000
2	1	6	1,0	1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan usaha/ kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY		30 usaha/kegiatan	160.252.200,00			30 usaha/kegiatan	520,500,000
2	1	0	1.0	0	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	85.264.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	324,500,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	0	1.0	0	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Orang	14.425.700,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		35 Orang	86,000,000
2	1	0	1.0	0	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	60.562.500,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	110,000,000
2	1	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		21.05 %	114.742.000,00			21.05 %	130,000,000
2	1	8	1.0		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat		40 entitas	114.742.000,00			40 entitas	130,000,000
2	1	0	1.0	0	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Lembaga	114.742.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		45 Lembaga	130,000,000
2	1	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup		100%	112.151.700,00			100%	600,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	9	1,0	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penambahan penghargaan LH tingkat nasional		3 penghargaan	112.151.700,00			3 penghargaan	600,000,000
2	1	0	1,0	0	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Entitas	112.151.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Entitas	600,000,000
2	1	1			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani		100%	27.227.800,00			100%	105,000,000
2	1	1	1,0	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup		100%	27.227.800,00			100%	105,000,000
2	1	1	1,0	0	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	27.227.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	105,000,000
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola		100%	19.281.699.200,00			100%	15,983,670,400
2	1	1	1,0	1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional		100%	19.281.699.200,00			100%	15,983,670,400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	1	1.0	0	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Ton	9.175.747.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750 Ton	8,850,453,000
2	1	1	1.0	0	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	11 Unit	10.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Unit	6,500,000,000
2	1	1	1.0	0	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750 Ton	52.652.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750 Ton	69,224,900
2	1	1	1.0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	53.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	500,000,000
2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.101.694.000,00				6,148,750,000
2	2	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan		7 Entitas	3.101.694.000,00			7 Entitas	6,148,750,000
2	2	8	5,0	1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola		82 objek	98.000.000,00			82 objek	2,500,000,000

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	0	5,0	0	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola		1 Unit	98.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		1 Unit	2,500,000,00
2	2	8	5,0		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		100	614.444.000,00			100	1,200,000,00
2	2	0	5,0	0	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan		2 Objek	614.444.000,00	Dana Keistimewaan DIY		2 Objek	1,200,000,00
2	2	8	5,0		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Hasil Fasilitas Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		13	2.389.250.000,00			13	2,448,750,00
2	2	0	5,0	0	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat		1 Laporan	2.389.250.000,00	Dana Keistimewaan DIY		1 Laporan	2,448,750,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				8.064.016.806,00				9,457,585,10
3	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan		69.33 %	6.697.946.506,00			69.33 %	4,695,856,00
3	2	3	1,0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan KPH		2 Dokumen	122.555.400,00			2 Dokumen	450,000,000
3	2	0	1,0	0	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	122.555.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	450,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	3	1,0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya produksi hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan		1101922682 rupiah	5.313.074.620,00			1101922682 rupiah	55,409,250,00
3	2	0	1.0	0	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Dokumen	15.434.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43 Dokumen	180,000,000
3	2	0	1.0	0	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan		8 Dokumen	3.516.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	20,000,000
3	2	0	1.0	0	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	4.701.415.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	53,041,000,00
3	2	0	1.0	0	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	592.708.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	2,168,250,00
3	2	3	1,0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan		275 ha	463.722.500,00			275 ha	3,022,270,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	1.0	0	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		5 Dokumen	23.341.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	216,500,000

3	2 8	0 3	1.0 4	0 2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245 Ha	202.235.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245 Ha	524,070,000
---	--------	--------	----------	--------	---	--	---	--------	----------------	------------------------------	--------	-------------

3	2 8	0 3	1.0 4	0 4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Ha	70.594.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	30 Ha	508,700,000
---	--------	--------	----------	--------	--	---	---	-------	---------------	--	-------	-------------

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	1.0	0	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350000	167.552.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350000	1,615,000,000
3	2	3	1,0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya penataan kawasan hutan		90,22%	641.092.700,00			90,22%	1,034,500,000
3	2	0	1.0	0	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15581 Ha	454.263.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15581 Ha	1,137,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	1.0	0	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15581 Ha	173.923.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15581 Ha	706,500,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	1.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	12.906.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	185,000,000
3	2	3	1,0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		13 unit manajemen	78.429.286,00			13 unit manajemen	275,000,000
3	2	0	1.0	0	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	78.429.286,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	205,000,000
3	2	3	1,0		Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya penambahan usaha perbenihan terdaftar		16 usaha	79.072.000,00			16 usaha	299,086,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	1.0	0	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	1 Sertifikat	19.497.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Sertifikat	75,500,000
3	2	0	1.0	0	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	1 Sertifikat	10.873.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Sertifikat	35,100,000
3	2	0	1.0	0	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	1 Sertifikat	12.653.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Sertifikat	45,000,000
3	2	0	1.0	0	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	1 Laporan	17.637.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	95,000,000
3	2	0	1.0	0	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ha	18.410.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Ha	48,486,000
3	2	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi		68,53 Nilai	402.322.500,00			68,53 Nilai	4,409,930,000
3	2	4	1,0		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi		65%	219.293.000,00			65%	1,029,930,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	0	1.0	0	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	94.058.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	276,400,000
3	2	0	1.0	0	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	6 Ha	107.686.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Ha	555,530,000
3	2	0	1.0	0	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Kab. Gunungkidul, Playen, Gading	4 Desa	17.547.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Desa	198,000,000
3	2	4	1,0		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola		3 lokasi	183.029.500,00			3 lokasi	3,380,000,000
3	2	0	1.0	0	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	74.725.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	254,000,000
3	2	0	1.0	0	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola		10 Ha	108.303.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Ha	430,000,000
3	2	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)		22.17 %	963.747.800,00			22.17 %	351,799,100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
3	28	5	1,01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat		15 kelompok	963.747.800,00			15 kelompok	351,799,100
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59 Orang	42.881.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59 Orang	143,469,700
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Kelompok	920.866.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Kelompok	208,329,400
TOTAL				Jumlah					79.961.547.149,00			36,606,604,000

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rumusan rencana kerja dan pendanaan DLHK DIY Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4-1 Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	68.795.836.343,00
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.490.380.443,00
2	11	1	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.565.900,00
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.761.400,00
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.383.200,00
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.421.300,00
2	11	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.796.132.929,00
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.674.392.929,00
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.740.000,00
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.000.000,00
2	11	1	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	67.800.000,00
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	67.800.000,00
2	11	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.006.500,00
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.955.000,00
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.471.800,00
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.030.300,00
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	9.710.400,00
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.839.000,00
2	11	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.459.100,00
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.210.700,00

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.248.400,00
2	11	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.850.760.974,00
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.680.000,00
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	841.334.200,00
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.005.746.774,00
2	11	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.151.655.040,00
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	327.341.670,00
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.945.070,00
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.368.300,00
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000,00
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	217.268.400,00
2	11	2	1,01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	85.000.000,00
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	85.000.000,00
2	11	2	1,02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	132.268.400,00
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	30.261.200,00
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	102.007.200,00
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.378.856.600,00
2	11	3	1,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.310.266.300,00
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	145.516.900,00
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	60.000.000,00
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.104.749.400,00
2	11	3	1,02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	68.590.300,00
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	68.590.300,00
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	13.258.000,00
2	11	5	1,01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.258.000,00
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	13.258.000,00
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	160.252.200,00
2	11	6	1,01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	160.252.200,00
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	85.264.000,00
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	14.425.700,00

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	60.562.500,00
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	114.742.000,00
2	11	8	1,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	114.742.000,00
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	114.742.000,00
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	112.151.700,00
2	11	9	1,01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	112.151.700,00
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	112.151.700,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	27.227.800,00
2	11	10	1,01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	27.227.800,00
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	27.227.800,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.281.699.200,00
2	11	11	1,01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	19.281.699.200,00
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	9.175.747.000,00
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	10.000.000.000,00
2	11	11	1.01	06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	52.652.200,00
2	11	11	1.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	53.300.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.101.694.000,00
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.101.694.000,00
2	22	8	5,01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	98.000.000,00
2	22	08	5.01	03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	98.000.000,00
2	22	8	5,08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	614.444.000,00
2	22	08	5.08	06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	614.444.000,00
2	22	8	5,09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.389.250.000,00
2	22	08	5.09	09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	2.389.250.000,00
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	8.064.016.806,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.697.946.506,00
3	28	3	1,02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	122.555.400,00
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	122.555.400,00
3	28	3	1,03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5.313.074.620,00
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	15.434.100,00
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	3.516.700,00
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	4.701.415.620,00
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	592.708.200,00

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
3	28	3	1,04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	463.722.500,00
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	23.341.200,00
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	202.235.200,00
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	70.594.000,00
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	167.552.100,00
3	28	3	1,05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	641.092.700,00
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	454.263.100,00
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	173.923.200,00
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan n Kebakaran Hutan dan Lahan	12.906.400,00
3	28	3	1,07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	78.429.286,00
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	78.429.286,00
3	28	3	1,09		Perbenihan Tanaman Hutan	79.072.000,00
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	19.497.400,00
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih	10.873.800,00
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	12.653.400,00
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	17.637.000,00
3	28	03	1.09	06	Pembangunan Sumber Benih	18.410.400,00
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	402.322.500,00
3	28	4	1,01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	219.293.000,00
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	94.058.500,00
3	28	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	107.686.900,00
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	17.547.600,00
3	28	4	1,03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	183.029.500,00
3	28	04	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	74.725.700,00
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	108.303.800,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	963.747.800,00
3	28	5	1,01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	963.747.800,00
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	42.881.600,00
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	920.866.200,00
TOTAL						79.961.547.149,00

BAB 5 PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja OPD

Renja DLHK DIY merupakan dokumen perencanaan DLHK DIY untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, yang disusun berpedoman pada RKPD DIY Tahun 2023 dan RPD DIY Tahun 2023 - 2026. Renja DLHK DIY Tahun 2023 memuat gambaran kinerja DLHK DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki terkait urusan lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun lalu dan tahun berjalan untuk kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan di tahun 2023.

Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam Renja DLHK DIY tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga memerlukan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program/ kegiatan/subkegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu penyelenggaraan seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dalam Renja DLHK DIY akan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DIY.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja DLHK DIY Tahun 2023 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut:

- a. DLHK DIY berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang mulai dirumuskan dalam Renja DLHK Tahun 2023;
- b. DLHK DIY berkewajiban untuk mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja DLHK Tahun 2023 dan RKPD DIY Tahun 2023 yang saat ini sudah mencapai tahap ;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLHK DIY Tahun 2023, Kepala DLHK DIY wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023;

- d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja DLHK DIY Tahun 2023 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan KUA – PPAS Tahun 2023.

Yogyakarta, Agustus 2022

Kepala,



D. W. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si
NIP. 196509041992031017